

IMPLEMENTASI REKRUTMENT PERANGKAT DESA DI KANTOR DESA LUBUK KEMBANG BUNGA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN

Anggi Berlianti¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin
Nasution No.13 Perhentian Marpoyan Perkanbaru, Indonesia 90221
anggiberlianti27@student.uir.ac.id

Abstrak

Implementasi rekrutment perangkat Desa masih ditemui permasalahan dikarenakan belum adanya keterbukaan penerimaan calon perangkat Desa sehingga sebagian masyarakat Desa tidak mengetahuinya. Desa Lubuk Kembang melakukan rekrutmen perangkat Desa masih belum adanya keterbukaan penerimaan calon perangkat Desa dan masih ditemui pelanggaran mulai tingkat usia dan pendidikan. Implementasi rekrutmen perangkat Desa di Desa Lubuk Kembang tidak terlepas dari penetapan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Implementasi Rekrutment Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan bahwa rekrutmen perangkat Desa di Desa Lubuk Kembang Bunga belum terimplementasi dengan maksimal hal ini dikarenakan belum dilakukan sosialisasi ditingkat masyarakat penerimaan calon perangkat Desa baik bentuk baliho maupun website Desa, belum terbukanya hasil tes secara tertulis dan wawancara bagi setiap calon perangkat Desa. Saran peneliti yaitu sebaiknya Pemerintah Desa melakukan sosialisasi penerimaan calon perangkat Desa melalui baliho atau website kantor Desa maupun secara langsung ditingkat masyarakat, sebaiknya pemerintah Desa menetapkan ujian tertulis dan wawancara bagi setiap calon perangkat Desa, dan Camat sebaiknya melakukan pendataan kembali persyaratan bagi setiap calon perangkat Desa yang di rekomendasikan Kepala Desa..

Kata Kunci : Implementasi, rekrutmen, Perangkat Desa.

Abstract

The implementation of recruitment for Village officials still faces obstacles because there is no transparency in the acceptance of prospective Village officials so that some Village residents do not know about it. Lubuk Kembang Village carries out recruitment of Village officials, there is still no openness in accepting prospective Village officials and violations are still found starting from age and level of education. The successful implementation of recruitment of Village officials in Lubuk Kembang Village cannot be separated from the formation of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The aim of this research is to determine the factors and obstacles in implementing recruitment of village officials at the Lubuk Kembang Bunga Village Office Ukui District Pelalawan Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussions regarding the recruitment of Village officials in Lubuk Kembang Bunga Village have not been carried out optimally because the provisions regarding the requirements for prospective Village officials have not been implemented properly, This is because there has been no socialization to the community regarding the acceptance of prospective Village officials, there has been no direct outreach to the community, and there has not been a written test and interview for each prospective Village official. The researcher's suggestion is that the

Village Government should conduct outreach regarding the acceptance of prospective Village officials through billboards or the Village office website or directly in front of the community. It is recommended that the Village Government determine a written test and interview for each candidate for Village officials. Prospective village and sub-district officials must collect the requirements of each prospective village official. recommended by the Village Head.

Keywords: *Implementation, Recruitment, Village Apparatus*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 3 Ayat 2, menjelaskan bahwa Sekertariat Desa itu terdiri dari 3 urusan dimana urusan tersebut adalah urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan. dan didalam sekertariat desa paling sedikit terdapat 2 urusan yaitu adalah urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Pasal 3 Ayat 3 masing- masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Dengan demikian, apabila perangkat desa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik maka masyarakat akan merasakan kepuasan kerja dari perangkat desa. sehingga apabila pekerjaan dari perangkat desa baik maka kinerja perangkat desa juga baik. untuk mendapatkan dan atau menghasilkan kinerja perangkat desa yang baik tentu didakannya rekrutmen pada saat pemilihan calon perangkat desa. Rekrutmen atau penarikan calon perangkat desa salah satu tindak lanjut dari perencanaan sumber daya manusia untuk mengisi sebuah jabatan yang kosong sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam kantor pemerintah tersebut, yaitu kantor desa. pada proses rekrutmen akan menarik calon- calon perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan syarat- syarat dan mekanisme yang ditentukan. dan calon perangkat desa harus memenuhi syarat- syarat untuk menjadi bagian dari perangkat desa dan dipilih atau diangkat sesuai dengan mekanisme. Dengan adanya rekrutmen, yang mana untuk memastikan bahwa input Sumber Daya Organisasi atau yang disebut dengan SDO yaitu Man (manusia/orang) untuk dipastikan kualitas dan kuantitasnya didalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 menjelaskan bahwa Untuk menjadi perangkat Desa, calon perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum yaitu meliputi:

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun.

- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bahwasanya Desa Lubuk Kembang Bunga berstatus desa Swasembada wajib memiliki 3 kepala urusan dan 3 kepala seksi. Perangkat Desanya memegang jabatan terdiri yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III Dan Kepala IV.

Perangkat Desa di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan 2022 terdiri dari 11 perangkat Desa dimana diketahui tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi kualitas dan hasil kinerja perangkat Desa tentunya ketetapan peraturan Pendidikan lebih rendah tingkat SLTA namun masih ada yang melanggar aturan dimana diketahui tingkat pendidikan dibawa SLTA meliputi tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan SD sebanyak 4 orang, serta pelanggaran aturan usia diatas 42 tahun sebanyak 2 orang, sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat kemampuan kinerja perangkat Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas perekrutan perangkat Desa Lubuk Kembang Bunga masih belum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perekrutan masih didasarkan ketetapan kepala Desa sementara sudah selayaknya tim perekrutan calon perangkat Desa sudah berdasarkan hasil seleksi secara administrasi dan kemampuan namun yang terjadi masih ditemuinya perangkat Desa yang memiliki tingkat Pendidikan dibawa tingkat SLTA dan usia diatas 42 tahun sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan latar belakang Adapun yang menjadi fenomena dalam peneliti Rekrutment Pengisian Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga sebagai berikut:

1. Komunikasi melalui sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh bagi masyarakat baik dalam bentuk baliho dikantor Desa maupun madding Desa sehingga Masyarakat tidak mengetahui jika akan dilakukan seleksi perangkat desa di wilayah tersebut. Sehingga seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk berpartisipasi tidak mendapatkan informasi mengenai akan diselenggarakannya kegiatan tersebut.
2. Kerjasama Kepala Desa dan tim pelaksana seleksi perangkat Desa belum dirasakan masyarakat dimana pemilihan perangkat Desa belum didasarkan keketapan yang berlaku melainkan hanya ketetapan dan usul kepala Desa.
3. Pengangkatan perangkat Desa dimana kepala Desa hanya merekomendasikan ke camat dan menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan perangkat desa sedangkan mekanisme tidak diterapkan seutuhnya oleh kepala desa terutama

melakukan penjarangan dan penyaringan melainkan secara langsung ditetapkan oleh kepala Desa.

4. Masih adanya perangkat Desa yang memiliki tingkat Pendidikan rendah tidak sesuai dengan aturan paling rendah SLTA sederajat dan usia melebihi ketetapan aturan paling tinggi 42 tahun namun masih ada yang melebihi usia tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel I.I

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena diatas bawa peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Rekrutment Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan."

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Mulyono,2016;42) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Syafri (2012;11-13) adanya unsur- unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata Usaha
8. Hubungan Masyarakat

Menurut Zulkifli (2005;16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepskan menjadi dua, yaitu:

- a. Administrasi dalam arti sempit
Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.
- b. Administrasi dalam arti luas
Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Definisi organisasi menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014;127) adalah suatu kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian ini organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu.

Syafri (2012;12) mengemukakan organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Anggara (2012;53), organisasi berasal dari bahasa Inggris "organization" yang berakar dari bahasa Latin *organiz* (are), kemudian dalam bahasa Inggris *organizer* yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015;12) manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (2012;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: *Man, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market*.

4. Konsep Rekrutmen

Menurut Siagian dalam (Sulistiyani dan Rosidah, 2018;72) diadakannya rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Menurut Simamora (2014;173) program rekrutmen yang baik itu melihat faktor-faktor dimana salah satunya adalah program rekrutmen memikat banyak melamar yang memenuhi syarat.

5. Konsep Implementasi

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai pelaksanaan, atau bisa juga penerapan. Menurut Guntur Setiawan (2014;71) dalam bukunya menyebutkan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Namun menurut pendapat Nurdin Usman (2017;79), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selanjutnya wahab (Wahab 2011 ;72) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Ada beberapa pendapat para ahli/teori tentang implementasi suatu kebijakan antara lain : menurut George Edward III (1984; 9-10), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi/Sikap
- d. Struktur Birokrasi

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Rekrutment Perangkat Desa. Dengan Tehnik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Rekrutment Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Diketahui bahwa kegiatan penetapan penjaringan perangkat Desa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh tim penjaringan perangkat Desa dengan berkoordinas RT/RW agar dapat disampaikan bagi masyarakat namun masyarakat belum mengetahuinya secara luas dikarenakan penyampaian hanya sebatas orang terdekat RT/RW saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa sosialisasi penjaringan rekrutmen perangkat Desa dengan melakukan sosialisasi oleh tim seleksi penjaringan perangkat Desa dengan koordinasi RT/RW untuk disampaikan bagi masyarakat namun belum dilakukan secara merata bagi masyarakat hal ini juga dikarenakan belum adanya sosialisasi dilakukan dalam bentuk baliho dikantor Desa atau ditegah masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya penerimaan pendaftaran perangkat Desa.

2. Sumberdaya

Diketahui bahwa kegiatan rekrutmen perangkat Desa Lubuk Kembang Bunga belum maksimal dimana kurangnya sosialisasi yang diberikan bagi masyarakat Luas dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga kegiatan rekrutmen perangkat Desa tidak sesuai dengan aturan dan persyaratan yang selayaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Rekrutmen calon perangkat Desa belum dilakukan ditegah masyarakat secara langsung melalui pemberitahuan melainkan kepala Desa telah menetapkan calon perangkat Desa untuk dipersiapkan menjadi perangkat Desa sehingga kegiatan rekrutmen tidak transparan.

3. Disposisi

Diketahui bahwa kegiatan rekrutmen perangkat Desa Lubuk Kembang Bunga belum maksimal dimana kurangnya sosialisasi yang diberikan bagi masyarakat sehingga kegiatan rekrutmen perangkat Desa belum diketahui masyarakat desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa keterbukaan Rekrutmen calon perangkat Desa belum dirasakan masyarakat secara luas hal ini dikarenakan kegiatan penerimaan masih tertutup mulai dari pembukaan kegiatan tes hingga pelantikan.

4. Struktur birokrasi

Diketahui bahwa kerjasama kepala Desa dan camat dalam penetapan perangkat Desa berdasarkan usul kepala Desa dan camat melakukan pengetesan secara tertulis, namun kenyataannya camat hanya memberikan rekomendasi untuk di lantik menjadi perangkat desa berdasarkan usul yang telah diberikan kepala Desa calon perangkat Desa sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Kerjasama kepala Desa dan camat sudah berlangsung dalam penetapan calon perangkat Desa namun perangkat Desa yang di usulkan kepala Desa kepada camat hanya sebatas pormalitas saja dimana camat tidak melakukan pendataan persyaratan calon perangkat Desa melainkan langsung direkomendasikan kepada kepala Desa untuk dilantik menjadi perangkat Desa.

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Implementasi Rekrutment Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, meliputi :

1. Diketahui Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa belum melakukan sosialisasi langsung ditegah masyarakat baik membagikan brosur, baliho dan pertemuan dalam rangka pemberitahuan penerimaan calon perangkat Desa dan aturan serta persyaratan yang ditetapkan sehingga masyarakat Desa secara luas tidak mengetahui adanya informasi penerimaan calon perangkat Desa.
2. Kepala Desa belum melakukan seleksi ketat terhadap calon perangkat Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga masih ada perangkat Desa yang melanggar aturan yang di usulkan bagi camat.

3. Kurangnya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan kepala desa agar melakukan pendataan setiap calon perangkat Desa sehingga calon perangkat Desa kebanyakan sudah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk di usulkan bagi camat.
4. Camat hanya menerima usulan dari kepala Desa terkait calon perangkat Desa dan memberikan rekomendasi bagi kepala Desa untuk ditetapkan menjadi perangkat Desa melainkan tidak dilakukan tes atau ujian tertulis sesuai dengan aturan.
5. Kurangnya ketegasan yang dilakukan Camat guna penetapan aturan penerimaan calon perangkat Desa berdasarkan peraturan bagi pemerintah Desa sehingga setiap calon perangkat Desa memiliki kualitas.
6. Belum adanya evaluasi yang dilakukan kepala Desa terhadap penilaian rekrutmen calon perangkat Desa sehingga memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya terutama saat penerimaan persyaratan bagi setiap calon perangkat Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Implementasi Rekrutment Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan melalui indikator penelitian diketahui belum maksimal dimana rekrutmen calon perangkat Desa belum dilakukan sosialisasi terbuka oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa secara langsung bagi masyarakat melainkan hanya himbuan bagi RT/RW, belum ditetapkannya aturan dan persyaratan penerimaan calon perangkat Desa oleh kepala Desa sehingga masih ditemuinya perangkat Desa yang melanggar aturan usia dan tingkat pendidikan, dan kurangnya kerjasama kepala desa, camat, Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan masyarakat dalam menerapkan penerimaan calon perangkat Desa yang berkopeten lulus sesuai persyaratan melainkan sudah ditetapkan sebelumnya oleh kepala Desa untuk diusulkan bagi camat dan direkomendasi agar ditetapkan menjadi perangkat Desa.
2. Sementara Faktor-faktor hambatan dalam Implementasi Rekrutment Perangkat Desa Di Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa diketahui Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa belum melakukan sosialisasi langsung ditegah masyarakat baik membagikan brosur, baliho dan pertemuan dalam rangka pemberitahuan penerimaan calon perangkat Desa dan aturan serta persyaratan yang ditetapkan, Kepala Desa belum melakukan seleksi ketat terhadap calon perangkat Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan, kurangnya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan kepala desa agar melakukan pendataan setiap calon perangkat Desa sehingga calon perangkat Desa kebanyakan sudah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk di usulkan bagi camat, Camat tidak melakukan tes atau ujian tertulis sesuai dengan aturan bagi setiap calon perangkat Desa, dan kurangnya ketegasan yang dilakukan Camat guna penetapan aturan penerimaan calon perangkat Desa berdasarkan peraturan, serta belum adanya evaluasi yang dilakukan kepala Desa terhadap

penilaian rekrutmen calon perangkat Desa sehingga memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya

Saran

1. Sebaiknya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melakukan pembukaan calon perangkat Desa melalui website kantor Desa sehingga masyarakat mengetahui adanya pembukaan calon perangkat Desa.
2. Sebaiknya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa belum melakukan sosialisasi langsung ditegah masyarakat dengan membagikan brosur, membuat baliho pemberitahuan sehingga masyarakat Desa secara luas mengetahui adanya informasi penerimaan calon perangkat Desa.
3. Sebaiknya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diberikan bimbingan teknis guna meningkatkan kemampuan dalam rekrutmen perangkat Desa
4. Sebaiknya Kepala Desa belum melakukan seleksi ketat terhadap calon perangkat Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Sebaiknya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan kepala desa agar melakukan pendataan setiap calon perangkat Desa sehingga calon perangkat Desa untuk di usulkan kepada Kepala Desa untuk di usulkan bagi camat.
6. Sebaiknya Camat melakukan tes atau ujian tertulis sesuai dengan aturan atas usulan calon perangkat Desa dari kepala Desa.
7. Perlunya ketegasan yang dilakukan Camat guna penetapan aturan penerimaan calon perangkat Desa berdasarkan peraturan bagi pemerintah Desa sehingga setiap calon perangkat Desa memiliki kualitas.
8. Sebaiknya adanya evaluasi yang dilakukan kepala Desa terhadap penilaian rekrutmen calon perangkat Desa sehingga memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Andry, H. 2015. Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Anggara, S. 2012. Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep,Teori,dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Guntur Setiawan, 2014. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan, M. S. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. 2014. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep,Teori,dan Isu Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mulyono. 2016. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jakarta: AR-RUZZ MEDIA.

- Nurdin Usman, 2017. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Simamora, H. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YPKN.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Teoritik dan Praktik Untuk Organisasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Syafri, W. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.

- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.

- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.

- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.

- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).

- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H.,

- Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177)*.
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD: " Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.

- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.

- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-

99. Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Perundang-undangan

Undang- Undang Republik Indonesia, nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Pelalawan, nomor 27 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.